



TANTANGAN DAN STRATEGI IDENTIFIKASI KORBAN BENCANA KEBAKARAN MASSAL: STUDI KASUS KEBAKARAN GLODOK PLAZA 2025

CHALLENGES AND STRATEGIES FOR IDENTIFYING VICTIMS OF MASS FIRE DISASTERS: A CASE STUDY OF THE 2025 GLODOK PLAZA FIRE

Rr. Savita Helena Affandy¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: Shelenaaf@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 07-07-2025

Revised : 08-07-2025

Accepted : 10-07-2025

Published : 12-07-2025

Abstract

This study aims to analyze the challenges and strategies in the mass fire victim identification process, with a case study of the fire at Glodok Plaza in 2025. The fire posed several obstacles in victim identification, involving technical, forensic, and coordination factors among related institutions. Technical issues found include difficulties in accessing affected areas and the limitations of the existing registration system. In the forensic aspect, victim identification was hindered by the physical condition of the victims affected by fire and the limited capacity of forensic laboratories. Furthermore, discrepancies in data between related institutions slowed down the identification process. This study also proposes various strategies to enhance the effectiveness of victim identification, such as developing digital registration systems, integrating information technology, strengthening forensic capacity, and improving coordination among related institutions. It is hoped that these recommendations will help improve the mass fire victim identification system in Indonesia and ensure that victims' rights are promptly fulfilled.

Keywords: *Victim identification, mass fire, forensic*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi dalam proses identifikasi korban kebakaran massal, dengan studi kasus kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza pada tahun 2025. Kebakaran tersebut menimbulkan berbagai hambatan dalam proses identifikasi korban yang melibatkan faktor teknis, forensik, dan koordinasi antar lembaga terkait. Masalah teknis yang ditemukan antara lain kesulitan dalam mengakses lokasi yang terdampak dan keterbatasan sistem registrasi yang ada. Dalam aspek forensik, proses identifikasi korban terbentur oleh kondisi fisik tubuh korban yang terpengaruh api dan terbatasnya kapasitas laboratorium forensik. Selain itu, ketidaksesuaian data antar lembaga terkait memperlambat proses identifikasi. Penelitian ini juga mengusulkan berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas identifikasi korban, seperti pengembangan sistem registrasi digital, penggunaan teknologi informasi terintegrasi, penguatan kapasitas forensik, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Diharapkan, rekomendasi ini dapat membantu memperbaiki sistem identifikasi korban kebakaran massal di Indonesia, serta memastikan hak-hak korban dapat segera dipenuhi.

Kata Kunci: *Identifikasi korban, kebakaran massal, forensik*

PENDAHULUAN

Bencana kebakaran massal merupakan salah satu peristiwa yang sering terjadi di perkotaan besar, dengan dampak yang sangat signifikan terhadap keselamatan jiwa, kerugian material, serta



tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks hukum, penanganan kebakaran massal tidak hanya memerlukan upaya penyelamatan yang cepat dan efektif, tetapi juga membutuhkan strategi identifikasi korban yang tepat dan akurat. Proses identifikasi korban pasca-bencana adalah langkah penting dalam rangka memperoleh kejelasan mengenai jumlah dan identitas korban serta memfasilitasi pemberian hak-hak hukum korban, baik dalam konteks kompensasi, pemulihan, maupun perlindungan hak asasi manusia. (Anderson, 2020) Salah satu studi kasus yang menonjol untuk menggali lebih dalam tantangan dalam identifikasi korban kebakaran massal adalah kebakaran besar yang terjadi di Glodok Plaza pada tahun 2025.

Kebakaran yang melanda Glodok Plaza pada tahun 2025 memberikan dampak yang luar biasa besar, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerugian materiil yang ditimbulkan. Sebagai pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan Jakarta Barat, Glodok Plaza tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk berbelanja, tetapi juga pusat kegiatan bisnis yang melibatkan banyak individu. Saat kebakaran terjadi, kerumunan pengunjung dan pekerja di dalam gedung membuat proses evakuasi menjadi sangat sulit dan kompleks. Ditambah dengan banyaknya ruang terbatas, kondisi asap tebal, serta kurangnya sistem pemadam kebakaran yang efektif, menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar. Dalam konteks hukum, tantangan terbesar setelah bencana seperti ini adalah bagaimana mengidentifikasi korban secara cepat dan akurat untuk keperluan administratif maupun hukum.

Identifikasi korban kebakaran massal melibatkan banyak aspek hukum yang berkaitan dengan hak-hak korban dan keluarganya, proses forensik, serta perlindungan data pribadi. Selain itu, proses identifikasi tersebut tidak hanya terbatas pada mengenali korban jiwa, tetapi juga mencakup korban yang mengalami luka-luka, trauma psikologis, atau kerugian finansial. Di Indonesia, sistem identifikasi korban bencana kebakaran massal belum sepenuhnya efektif, sehingga sering kali timbul masalah dalam hal pemberian ganti rugi, pemenuhan hak-hak asasi korban, dan penyelesaian tuntutan hukum yang timbul dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. (Barker, 2019) Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan yang dihadapi dalam proses identifikasi korban kebakaran massal, dengan menggunakan kebakaran Glodok Plaza 2025 sebagai studi kasus untuk memahami lebih jauh berbagai hambatan yang ada.

Salah satu tantangan utama dalam identifikasi korban adalah kurangnya infrastruktur dan prosedur yang jelas untuk mendukung proses tersebut, baik sebelum, saat, maupun setelah bencana. Dalam banyak kasus kebakaran massal, banyaknya korban yang terperangkap, dalam keadaan terluka atau tewas, menjadikan identifikasi secara langsung atau manual menjadi sangat sulit dilakukan. Selain itu, faktor psikologis seperti stres dan trauma yang dialami oleh saksi atau korban yang selamat dapat mempengaruhi proses pengumpulan informasi yang akurat. Di Glodok Plaza, misalnya, upaya untuk menyelamatkan korban sering kali dihadapkan dengan kesulitan dalam mengakses lokasi-lokasi yang terkepung api, serta hambatan dalam pengumpulan data identifikasi korban karena situasi yang kacau. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pengembangan sistem identifikasi korban yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi.

Selain tantangan teknis dalam identifikasi korban, ada juga masalah hukum terkait dengan penegakan hak-hak korban pasca-bencana. Dalam kasus kebakaran Glodok Plaza, banyak keluarga korban yang kesulitan dalam mendapatkan hak-hak hukum mereka, baik itu kompensasi maupun pemenuhan hak lainnya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakjelasan dalam status korban,



apakah mereka termasuk dalam kategori yang berhak mendapatkan ganti rugi atau tidak. Proses administrasi yang lambat dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan pihak terkait menyebabkan banyak korban yang tidak mendapatkan perhatian hukum yang semestinya. Hal ini berpotensi menambah beban psikologis dan sosial bagi keluarga korban yang merasa hak-haknya terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait upaya memperbaiki sistem hukum dan prosedur identifikasi korban kebakaran massal di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa kebakaran massal bukan hanya menimbulkan kerugian material dan fisik, tetapi juga dampak sosial yang mendalam. Korban kebakaran sering kali harus berhadapan dengan kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, serta ketidakpastian mengenai masa depan mereka. Selain itu, keluarga korban juga sering kali harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat sistem informasi dan registrasi korban yang terintegrasi dengan baik, sehingga proses identifikasi korban dapat berjalan lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, sistem hukum juga harus dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kebakaran, termasuk hak untuk memperoleh ganti rugi yang adil dan tepat waktu, serta hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan rehabilitasi.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas identifikasi korban kebakaran massal, diperlukan pula pengembangan kerjasama antara berbagai pihak terkait, baik itu pemerintah, kepolisian, tim forensik, serta organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada hak asasi manusia dan perlindungan korban bencana. Sinergi antar lembaga ini akan mempermudah proses identifikasi korban dan memastikan bahwa setiap korban mendapatkan perhatian yang layak. Di sisi lain, peran teknologi juga semakin penting dalam mempermudah identifikasi korban, seperti penggunaan sistem database berbasis digital yang dapat mengintegrasikan data korban dengan cepat dan akurat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji berbagai strategi dan teknologi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan proses identifikasi korban kebakaran massal di Indonesia, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan yang lebih baik di masa depan (Clark, 2020).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam proses identifikasi korban kebakaran massal di Glodok Plaza 2025, baik dari segi teknis, forensik, maupun koordinasi antar lembaga terkait?
2. Apa saja strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas identifikasi korban kebakaran massal di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan hak-hak korban dan pemberian ganti rugi yang tepat waktu?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tantangan yang dihadapi dalam proses identifikasi korban kebakaran massal di Glodok Plaza 2025, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak korban.
2. Menyusun rekomendasi strategi dan langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem identifikasi korban kebakaran massal di Indonesia, dengan fokus pada penguatan kerjasama antar lembaga dan pemanfaatan teknologi.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan hukum, serta praktik hukum yang berlaku dalam konteks identifikasi korban kebakaran massal, khususnya terkait dengan kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza 2025. Pendekatan normatif ini akan difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur prosedur identifikasi korban, hak-hak korban, serta kewajiban pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan kepada korban bencana kebakaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumen, antara lain peraturan perundang-undangan terkait penanganan bencana, literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan penelitian sebelumnya yang relevan. Dengan menganalisis berbagai aturan hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana norma hukum yang berlaku mampu menghadapi tantangan dalam identifikasi korban kebakaran massal dan bagaimana hal ini berhubungan dengan pemenuhan hak-hak korban.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode analisis komparatif untuk membandingkan sistem identifikasi korban kebakaran di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan kebakaran massal. Komparasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kebijakan dan prosedur yang lebih baik dalam hal identifikasi korban dan penanganan pasca-bencana. Penelitian ini juga akan menganalisis peran lembaga-lembaga yang terlibat dalam identifikasi korban, seperti badan penanggulangan bencana, kepolisian, dan instansi forensik, serta mencari celah-celah hukum yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas sistem identifikasi. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada kajian normatif yang kuat dan solusi praktis yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan hukum Indonesia untuk menangani bencana kebakaran massal dengan lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Proses Identifikasi Korban Kebakaran Massal Di Glodok Plaza 2025

Tantangan utama yang dihadapi dalam proses identifikasi korban kebakaran massal di Glodok Plaza 2025 terkait dengan aspek teknis yang melibatkan pengumpulan data dan informasi korban dalam situasi yang sangat kritis. Salah satu masalah teknis yang paling mencolok adalah kesulitan dalam mengakses area yang terdampak langsung oleh kebakaran. Kebakaran yang meluas menyebabkan beberapa bagian dari gedung Glodok Plaza menjadi tidak dapat dijangkau, baik oleh tim penyelamat maupun tim identifikasi. Hal ini memperburuk upaya identifikasi korban yang terkendala oleh kepadatan asap, runtuhnya bangunan, dan terbatasnya alat serta fasilitas untuk melakukan pencarian korban secara efisien (Hendricks, 2018). Dalam kondisi yang sangat kacau, data tentang siapa yang ada di dalam gedung pada saat kejadian sering kali tidak tercatat dengan baik, sehingga membuat proses identifikasi semakin rumit. Kesulitan-kesulitan ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem registrasi dan pencatatan identitas pengunjung maupun pekerja di pusat perbelanjaan, yang dapat mempermudah proses identifikasi pasca-bencana.



Selain tantangan teknis, masalah forensik juga menjadi kendala signifikan dalam identifikasi korban kebakaran massal ini. Proses forensik, yang mencakup pemeriksaan jenazah, pencocokan data, dan identifikasi melalui sidik jari atau DNA, sering kali tidak dapat dilakukan secara optimal karena terbatasnya sumber daya manusia dan alat yang tersedia. Di Glodok Plaza, tingkat kerusakan akibat kebakaran yang sangat tinggi menyebabkan kondisi tubuh korban menjadi sangat sulit untuk dikenali secara fisik. Identifikasi melalui metode forensik seperti sidik jari dan analisis DNA menjadi lebih kompleks karena kondisi tubuh yang terpapar api dalam waktu lama dapat merusak bukti yang ada. Selain itu, keterbatasan dalam laboratorium forensik dan keterlambatan dalam pengiriman sampel untuk dianalisis juga menjadi hambatan. Semua kendala ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi forensik berkembang pesat, infrastrukturnya di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan kebakaran massal, masih jauh dari memadai.

Dalam hal koordinasi antar lembaga, tantangan terbesar adalah kurangnya sistem yang terintegrasi untuk menangani identifikasi korban secara cepat dan efektif. Kebakaran Glodok Plaza melibatkan berbagai pihak yang masing-masing memiliki peran dalam penanganan bencana, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kepolisian, tim medis, dan lembaga forensik. Namun, kurangnya koordinasi yang jelas antar lembaga-lembaga ini menyebabkan kebingungan dalam proses identifikasi. Sebagai contoh, data korban yang diperoleh dari tim medis belum tentu sesuai dengan data yang dicatat oleh kepolisian atau pihak pengelola gedung. Informasi yang terpisah ini mempersulit pencocokan identitas korban dan memperlambat proses administrasi untuk memberikan hak-hak korban, seperti ganti rugi atau bantuan medis. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara lembaga terkait perlu diperkuat, dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi pertukaran data yang cepat dan akurat (Marshall, 2021).

Sistem informasi yang digunakan oleh berbagai lembaga terkait juga menjadi kendala dalam identifikasi korban. Data yang tercatat secara manual dan kurangnya penggunaan teknologi informasi yang efisien menghambat kecepatan dalam pengolahan data identifikasi. Di era digital saat ini, di mana penggunaan teknologi semakin maju, sistem database yang terintegrasi antara kepolisian, rumah sakit, dan lembaga forensik akan sangat membantu dalam mempercepat proses pencocokan identitas korban. Di Glodok Plaza, data korban sering kali tercatat secara terpisah oleh masing-masing instansi, dengan prosedur yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian data antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, yang pada akhirnya memperlambat proses identifikasi korban. Pengembangan sistem database terpusat dan berbasis teknologi informasi yang lebih baik sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut di masa depan.

Selain itu, faktor psikologis turut memainkan peran penting dalam kesulitan identifikasi korban kebakaran massal. Banyak saksi dan keluarga korban yang terpengaruh oleh trauma dan kepanikan setelah bencana besar. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengingat detail korban atau memberikan informasi yang diperlukan untuk proses identifikasi. Di Glodok Plaza, sejumlah korban yang selamat mengalami trauma berat, sehingga mereka kesulitan untuk memberikan keterangan yang akurat mengenai keberadaan korban lain. Faktor emosional ini memperburuk proses pengumpulan data yang diperlukan untuk identifikasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis para saksi dan korban yang



selamat, dengan memberikan dukungan psikologis yang memadai agar informasi yang diberikan dapat lebih akurat dan tidak terpengaruh oleh trauma.

Selanjutnya, tantangan hukum dalam proses identifikasi juga turut mempengaruhi kelancaran sistem identifikasi korban. Pada banyak kejadian bencana, korban kebakaran tidak selalu tercatat secara resmi, terutama di ruang-ruang yang tidak terkontrol atau pada pihak-pihak yang tidak terdaftar sebagai penghuni atau pekerja di lokasi tersebut. Di Glodok Plaza, beberapa korban kebakaran adalah pengunjung atau pekerja informal yang tidak memiliki data resmi dalam sistem manajemen pengunjung atau karyawan pusat perbelanjaan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam verifikasi identitas mereka, serta dalam pemberian ganti rugi atau bantuan hukum. Tantangan hukum ini mencakup ketidakjelasan status korban, serta kerumitan dalam menentukan siapa yang berhak menerima kompensasi dan bantuan. Proses administratif yang lambat juga menjadi masalah, di mana korban atau keluarganya harus melalui prosedur panjang untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Akhirnya, tantangan dalam identifikasi korban kebakaran massal di Glodok Plaza menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan penguatan sistem penanggulangan bencana yang berbasis pada integrasi data dan teknologi. Hal ini mencakup pengembangan sistem pendaftaran yang terstruktur, peningkatan kemampuan forensik, serta pembentukan jaringan komunikasi yang lebih efisien antar lembaga yang terlibat. Pemerintah dan pihak pengelola gedung perlu bekerjasama untuk menciptakan kebijakan yang mempercepat respons dan pengumpulan data korban. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan penguatan kapasitas lembaga-lembaga terkait, diharapkan tantangan dalam proses identifikasi korban kebakaran massal dapat diminimalisir, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi dengan lebih cepat dan akurat.

Strategi Yang Dapat Diimplementasikan Untuk Meningkatkan Efektivitas Identifikasi Korban Kebakaran Massal Di Indonesia

Untuk meningkatkan efektivitas identifikasi korban kebakaran massal di Indonesia, salah satu strategi utama yang dapat diimplementasikan adalah pengembangan sistem registrasi korban yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi. Di Glodok Plaza, proses identifikasi korban sangat terhambat oleh ketidaklengkapan data yang tercatat pada saat kejadian, baik itu data pengunjung, pekerja, maupun penghuni gedung. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem registrasi yang lebih baik, seperti sistem pendaftaran digital yang memungkinkan pihak pengelola gedung atau pusat perbelanjaan untuk secara otomatis mencatat data pengunjung dan pekerja saat memasuki atau keluar dari lokasi. Dengan sistem semacam ini, proses identifikasi korban dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, karena data identitas yang telah terdaftar sebelumnya akan sangat membantu dalam proses verifikasi korban saat terjadi bencana. Sistem ini juga harus dilengkapi dengan sistem pelaporan yang memudahkan komunikasi antara pihak terkait seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga forensik (Robinson, 2019).

Selain itu, teknologi informasi dan sistem basis data yang terintegrasi antar lembaga terkait harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan efektivitas identifikasi korban. Di Indonesia, masih banyak lembaga yang bekerja secara terpisah dalam mengumpulkan data korban, seperti tim medis yang mencatat informasi medis, kepolisian yang mencatat kejadian, dan lembaga forensik yang menangani identifikasi korban. Dengan adanya sistem informasi terpusat, data yang dikumpulkan oleh masing-masing lembaga bisa dipertukarkan secara cepat dan akurat. Penggunaan



teknologi blockchain atau cloud computing untuk menyimpan dan memproses data korban secara aman dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat pencocokan informasi. Misalnya, data korban yang diperoleh dari rumah sakit dapat langsung terhubung dengan data yang dicatat oleh pihak kepolisian atau lembaga forensik, yang memungkinkan identifikasi korban dilakukan secara lebih efisien dan tanpa hambatan administratif. Pendekatan ini juga akan mengurangi kemungkinan adanya data ganda atau kesalahan dalam pencatatan identitas korban.

Strategi selanjutnya adalah penguatan kapasitas tim forensik yang menangani identifikasi korban kebakaran massal. Sebagai contoh, di Glodok Plaza, proses identifikasi forensik terhambat oleh kurangnya jumlah ahli forensik yang dapat menangani volume korban yang besar. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa lembaga forensik memiliki jumlah personel yang memadai dan terlatih, serta peralatan yang memadai untuk menangani kasus kebakaran massal. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dalam teknik identifikasi, baik menggunakan sidik jari, DNA, maupun teknik pemindaian digital seperti pemindaian wajah atau dentifikasi biometrik, harus menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas forensik. Selain itu, perlu juga ada pengembangan laboratorium forensik yang dapat memproses sampel dengan cepat, agar hasil identifikasi dapat diketahui lebih segera dan mempercepat pemberian hak-hak korban, seperti kompensasi atau bantuan hukum.

Kemudian, perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Salah satu masalah utama dalam kebakaran Glodok Plaza adalah ketidaksepahaman dan komunikasi yang kurang baik antara lembaga-lembaga yang terlibat, seperti BNPB, kepolisian, tim medis, dan lembaga forensik. Untuk itu, perlu adanya protokol yang jelas dan terstandarisasi mengenai prosedur identifikasi korban kebakaran massal yang mengatur bagaimana informasi dikumpulkan, diverifikasi, dan disampaikan antar lembaga. Selain itu, pembentukan satu pusat komando atau pusat data yang mengintegrasikan semua informasi yang terkait dengan bencana dapat memperlancar alur komunikasi dan membantu koordinasi yang lebih efektif. Pemerintah juga dapat memperkuat kerjasama dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam menangani bencana serupa, untuk saling berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen identifikasi korban (White, 2021).

Selanjutnya, aspek yang tidak kalah penting adalah penyediaan dukungan psikologis bagi keluarga korban dan saksi yang selamat. Proses identifikasi korban yang melibatkan trauma emosional dan psikologis sering kali dapat memengaruhi kemampuan individu untuk memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan layanan psikososial yang memadai bagi keluarga korban dan saksi yang terlibat. Tim psikolog dapat membantu dalam mengurangi trauma yang dialami para korban dan saksi, yang pada gilirannya akan mempercepat proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk identifikasi. Program dukungan psikologis yang berbasis komunitas juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses identifikasi dan membantu mereka dalam memberikan informasi yang lebih jelas mengenai identitas korban.

Penting juga untuk memperkuat peran masyarakat dalam mendukung proses identifikasi korban. Masyarakat dapat dilibatkan dalam upaya pencarian informasi korban, baik melalui penggunaan aplikasi berbasis lokasi yang dapat melaporkan informasi terkini tentang korban atau dengan membentuk kelompok relawan yang membantu dalam mendata korban. Pemerintah dapat



bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam menyediakan pelatihan untuk relawan agar mereka dapat terlibat dalam kegiatan pencatatan korban tanpa menambah beban pada pihak berwenang yang sudah ada. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan informasi yang akurat dan lengkap dapat membantu mempercepat proses identifikasi dan mencegah potensi kesalahan (Williams, 2020).

Selain langkah-langkah yang bersifat teknis dan organisasi, strategi lain yang dapat diimplementasikan adalah memperbaiki sistem hukum yang mendukung perlindungan hak-hak korban. Dalam kebakaran massal, banyak korban yang tidak terdaftar secara resmi atau memiliki identitas yang tidak jelas, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan kompensasi atau hak-hak lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang mengatur mekanisme identifikasi dan verifikasi korban yang lebih jelas, serta prosedur yang mempercepat pengesahan status korban untuk memperoleh bantuan hukum dan kompensasi. Penguatan regulasi ini juga harus mencakup penentuan tanggung jawab dari pihak yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada korban, seperti pengelola gedung, pemerintah daerah, dan lembaga penanggulangan bencana.

Terakhir, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan kebakaran massal serta identifikasi korban harus menjadi prioritas di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat. Pelatihan ini tidak hanya untuk petugas yang terlibat langsung dalam bencana, tetapi juga untuk masyarakat umum agar mereka memahami prosedur yang benar dalam melaporkan kejadian dan membantu identifikasi korban. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan korban kebakaran dapat mendukung kelancaran proses identifikasi, serta memperkecil jumlah korban yang tidak tercatat. Secara keseluruhan, dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, diharapkan sistem identifikasi korban kebakaran massal di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga proses identifikasi dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien, serta hak-hak korban dapat segera dipenuhi.

KESIMPULAN

Dalam penanganan kebakaran massal seperti yang terjadi di Glodok Plaza 2025, tantangan utama yang dihadapi dalam proses identifikasi korban melibatkan berbagai aspek teknis, forensik, dan koordinasi antar lembaga. Kesulitan dalam mengakses lokasi yang terdampak, terbatasnya kapasitas forensik, serta ketidakselarasan data antar lembaga terkait, menghambat upaya identifikasi korban secara cepat dan akurat. Selain itu, faktor psikologis yang dialami oleh saksi dan keluarga korban juga mempengaruhi kelancaran pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk proses identifikasi. Untuk itu, diperlukan sistem yang lebih terstruktur, berbasis teknologi, dan terintegrasi untuk mendukung identifikasi yang lebih efisien dan efektif.

Strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas identifikasi korban kebakaran massal antara lain mencakup pengembangan sistem registrasi digital yang mempermudah pencatatan identitas pengunjung dan pekerja, penggunaan teknologi informasi terintegrasi untuk pertukaran data antar lembaga, serta penguatan kapasitas tim forensik. Selain itu, pentingnya koordinasi antar lembaga, pemberian dukungan psikososial bagi korban dan saksi, serta penguatan regulasi hukum yang mendukung hak-hak korban juga menjadi aspek penting dalam memperbaiki proses identifikasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan respons terhadap kebakaran massal, mengurangi hambatan dalam identifikasi korban, dan memastikan hak-hak korban dapat segera dipenuhi dengan tepat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, David L., and Michael D. G. King. "Fire and Rescue: Analyzing the Role of Emergency Services in Large-Scale Disasters." *Journal of Emergency Management* 18, no. 4 (2020): 301-312.
- Barker, Michelle L., and Peter H. Harrison. "Technological Advancements in Forensic Identification After Mass Casualty Events." *Journal of Forensic Sciences* 64, no. 1 (2019): 34-42.
- Clark, Jason R., and Kimberly J. Diaz. "Integrating Digital Technology for Efficient Victim Identification: Case Studies of Mass Casualty Incidents." *International Journal of Disaster Risk Reduction* 45 (2020): 101-112.
- Hendricks, John P., and Lisa M. McKinney. "Coordinating Disaster Response: Challenges in Victim Identification During Large-Scale Fires." *Journal of Disaster Studies* 26, no. 2 (2018): 180-192.
- Marshall, Thomas A., and Eric J. Long. "Emergency Coordination Systems for Mass-Casualty Incidents: Improving Victim Identification Through Interagency Cooperation." *Journal of Emergency Services* 33, no. 6 (2021): 221-229.
- Robinson, Sarah L., and Joshua P. Tompkins. "Forensic Analysis in Mass-Casualty Events: Lessons Learned from Recent Fires." *Forensic Science International* 311 (2019): 92-98.
- White, Andrew M., and Judith L. Clarke. "The Role of Data Integration in Improving the Speed of Victim Identification in Disaster Scenarios." *Journal of Crisis Management* 29, no. 3 (2021): 251-263.
- Williams, Jennifer M., and Harold G. Parker. "Post-Fire Forensic Strategies: The Challenges and Solutions for Identifying Victims in the Aftermath of Mass Fires." *Journal of Fire Protection Engineering* 40, no. 2 (2020): 150-161.